PEMKOT PALANGKA RAYA DIMINTA MAKSIMALKAN PAJAK WALET

Sumber gambar: https://kalteng.antaranews.com/

Palangka Raya (ANTARA) - Sekretaris Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Pitria Noor Jaya mengingatkan sekaligus meminta pemerintah setempat, agar dapat lebih memaksimalkan potensi pajak walet sebagai upaya mendorong pendapatan asli daerah.

"Saya menerima informasi bahwa saat ini pemerintah kota masih kesulitan dalam mendata dan memaksimalkan pajak dari bisnis sarang burung walet," kata Pitria di Palangka Raya, Rabu.

Adapun kesulitan itu, lanjut dia, akibat banyak pengusaha walet yang dinilai belum transparan terkait hasil produksi mereka, sehingga perhitungan pajak belum optimal. Alhasil, masih ada ketidaksesuaian antara jumlah hasil produksi walet dengan data yang dilaporkan kepada pemerintah.

"Kendala itu sebagian besar karena kurangnya kesadaran pengusaha walet akan kewajiban pajak. Mungkin juga sebagian tidak sepenuhnya memahami regulasi yang ada. Jadinya mereka tidak sepenuhnya jujur dalam melaporkan pendapatan mereka," ucapnya.

Pria yang kerap disapa Ade juga menilai bahwa pemerintah kota harus segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha walet tersebut. Hal ini dikarenakan, usaha sarang walet saat ini telah kian menjamur di Kota Palangka Raya sehingga menjadi salah satu sektor pajak yang potensial untuk dimaksimalkan.

"Dalam aturan itu memang terkadang ada yang sadar dan ada yang tidak, kembali lagi pada acuan aturan yang ada. Kalau acuan aturannya sudah jelas tentang pajak walet, maka seharusnya para pengusaha juga bisa lebih patuh," ujarnya.

Politisi partai Gerindra ini juga menekankan pentingnya upaya sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat, khususnya para pengusaha sarang burung walet. Pemkot Palangk Raya diharapkan dapat meningkatkan upaya pendataan serta penerapan aturan pajak yang lebih tegas, sehingga langkah ini diharapkan mampu meningkatkan

pendapatan asli daerah dari sektor sarang burung walet, yang potensinya cukup besar namun belum dimanfaatkan secara optimal.

"Sosialisasi yang lebih intensif dapat membantu meningkatkan pemahaman para pengusaha tentang pentingnya kewajiban pajak. Dengan demikian, mereka yang sebelumnya tidak tahu menjadi paham dan mulai melaksanakan kewajiban pajak dengan benar," demikian Pitria.

Sumber Berita:

1. https://kalteng.antaranews.com/berita/731029/pemkot-palangka-raya-diminta-maksimalkan-pajak-walet, Rabu, 20 November 2024.
2. https://jurnalborneo.co.id/berita/pemko-diminta-maksimalkan-pajak-walet/, Rabu, 20 November 2024.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.